



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 38-50

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Konsep *Value for Money*

I Putu Ekayana^{1✉}, I Dewa Ayu Putri Wirantari²

Universitas Udayana Bali

Email: ekayana66@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Value for Money merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah anggaran Kantor Sekretariat Daerah Bali telah memenuhi persyaratan nilai yang ditetapkan dari segi keuangan, efisiensi dan efektivitas. Informasi diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa program Badan Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2021 – 2022 memenuhi persyaratan nilai Value for Money, menunjukkan hasil yang ekonomis, efisien dan efektif.

Kata Kunci: *Pengukuran Kerja, Konsep Value for Money*

Abstract

Value for Money is a public sector management concept based on three main elements: economy, efficiency, and effectiveness. The purpose of this study is to determine whether the Bali Regional Secretariat Office budget has met the requirements of value for money in terms of finance, efficiency and effectiveness. Information was obtained through interviews and documentation. The analysis method used is descriptive qualitative method. The results of the study found that the Bali Provincial Secretariat Organization Agency program for 2021 - 2022 met the requirements of Value for Money, showing economical, efficient and effective results.

Keywords: *Measurement of Work, Value for Money Concept*

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam pemerintahan untuk menganalisis akuntabilitas dalam menghasilkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk memusatkan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diukur dengan menggunakan konsep *value for money*. *Value for money* merupakan konsep penilaian atau pengukuran kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. Melalui konsep ini dapat memberikan informasi berupa indikator apakah (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
Nindy Cahya Feriska Sari (2014)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Penerapan konsep melalui value for money	Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik	https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id
Wayan Cipta (2014)	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit	Value For Money Variabel, Penerimaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah	https://ejournal.undiksha.ac.id/

	Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011	Pendapatan Asli Daerah	Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007- 2011 secara total berada pada kategori sangat baik.	
Isna Ardila (2015)	Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Kinerja Keuangan, Pendekatan value for money	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah efektif dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan pelayanan agar lebih baik lagi.	https://Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2015 journal.umsu.ac.id
Kevin R.M (2015)	Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikatkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung	Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian, menunjukkan pemerintah Kota Bitung secara umum dapat dikatakan sangat efektif. Dilihat dari tingkat keserasian, secara umum belum serasi karena kinerja PAD pada belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung.	https://ejournal.unsrat.ac.id/

Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang berkaitan dengan bidang keuangan Negara dari anggaran hingga pelaporan, termasuk pengaruh yang ditimbulkan (Sujarweni, 2015 : 18). Akuntansi pemerintahan memiliki fungsi yaitu mengadakan laporan dan membantu mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sadeli, 2015 : 6). Dalam suatu organisasi, kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja (*performance*) adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang digunakan sebagai tolak ukur (Mahsun, 2013 : 25). Pengukuran kinerja (*performance measurement*) menurut Mahsun (2013:26) digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009 : 121), pengukuran kinerja pada organisasi sektor bertujuan untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

Anggaran adalah dokumen berupa penerimaan dan pengeluaran yang akan dicapai pada waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim dan Kusufi 2017:48). Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran

di antaranya jumlah produk dan harga jualan untuk tahun depan (Sasongko dan Parulian 2015:2). Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2017:219) antara lain yaitu untuk landasan dalam memilih sumber dan investasi dana, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, serta merasionalkan sumber dan investasi dana agar mencapai hasil maksimal. Menurut Nafarin (2013:5), seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan kedalam empat fungsi pokok yaitu fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Menurut Mahmudi (2013 : 83) *value for money* merupakan konsep dalam yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. *Value for money* menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi (pemerolehan sumber daya tertentu pada harga yang terendah), efisiensi (hubungan antara *input* dan *output* yang mana digunakan untuk mencapai *output* tertentu) dan efektivitas (hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, strategi dan prosedur dalam mencapai tujuan). Indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan diantaranya yaitu: ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009 : 130).

Mahmudi (2013 : 83-84) menjelaskan bahwa, ekonomi terkait dengan pengkonversian *input* berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, kerangka kerja, dan produk modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Tingkat ekonomi diukur dengan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja dengan persentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Outcome}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output = Presentasi yang diperoleh dari suatu kegiatan

Input = Presentase nilai ekonomi

Semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria efisiensi pengukuran kinerja yaitu < 90% berarti sangat efisien, 90 s.d. 99% berarti efisien, 100% berarti cukup efisien, dan > 100% berarti tidak efisien. Mahmudi (2013 : 86) menjelaskan bahwa, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka

semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berpusat pada *input* dan efisiensi pada *output*, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil).

Tingkat efektivitas dapat dilihat dengan mengukur perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggarannya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan

Output = Presentase yang diperoleh dari suatu kegiatan

Semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah semakin baik. Kriteria efektivitas pengukuran kinerja keuangan yaitu $\geq 100\%$ berarti efektif, 85 s.d. 99% berarti cukup efektif, 65 s.d. 84% berarti kurang efektif, dan ≤ 65 berarti tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan konsep *value for money*, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk Pemerintah Provinsi Bali.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bali dengan mengambil data dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk mengukur kinerja anggaran berdasarkan konsep *value for money* yaitu dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Pengukuran kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali didasarkan pada data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Jasa.

Tabel 2. Laporan Keuangan Biro Sekertariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 – 2022 *Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih/(Kurang)	%
2021	2.941.795.075,00	2.927.641.388,00	14.153.687	0,99
2022	3.210.920.000,00	3.164.447.718,00	46.472.282,00	0,98

Sumber Data: data sekunder yang diolah

Anggaran belanja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan terutama pada belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Bali juga mengalami peningkatan hampir mencapai target anggaran yang ditetapkan, hanya sekitar 2% sampai 3% dari total anggaran yang tidak terealisasi. Hal ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan. Berikut adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Organisasi Sekertariat Daerah Di Bali untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja kegiatan di tahun 2021-2022.

Tabel 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021- 2022

N O	Program & Kegiatan	FISIK						KEUANGAN					
		Target		Realisasi		%		Target		Realisasi		%	
		20 21	2022	202 1	202 2	20 21	202 2	2021	2022	2021	2022	202 1	202 2
A		Belanja Barang dan Jasa											
1	Belanja Bolpont	50 0	3195 Buah	500 Bua h	319 5 Bua h	10 0	100	3.600.000	24.560.000	3.600.000	24.560.00 0	100	100
2	Belanja Post IT	52 5	480 Buah	525 Bua h	480 Bua h	10 0	100	8.997.000	5.424.000	8.997.000	5.424.000	100	100
3	Belanja Binder Clips	13. 07 5	12.800 Kotak	13.0 75 Kotak	12.8 00 Kotak	10 0	100	121.800.0 00	128.536.000	121.739.700	128.500.1 80	99	99
4	Belanja Map Folio	10. 90 0	11.072 Buah	10.9 00 Bua h	11.0 72 Bua h	10 0	100	57.605.00 0	60.896.000	57.605.000	60.896.00 0	100	100

5	Belanja Tinta Botol	540	384 Botol	540 Botol	384 Botol	100	100	76.750.000	52.760.000	76.743.400	52.760.000	99	100
6	Kalkulator	-	16 Buah	-	16 Buah	-	100	-	2.000.000	-	2.000.000	-	100
7	Belanja Kertas Foto	1575	1120 Pack	1575	1120 Pack	100	100	41.580.000	28.568.000	41.580.000	28.568.000	100	100
8	Belanja Veburator	70	32 Buah	70	32 Buah	100	100	2.625.000	1.260.000	2.625.000	1.260.000	100	100
9	Belanja Odner	350	1192 Buah	350	1192 Buah	100	100	9.625.000	42.423.000	9.625.000	42.423.000	100	100
10	Belanja Kertas HVS	2075	2110 Rim	2075	2110 Rim	99	100	122.475.935	121.880.000	122.073.400	121.880.000	99	100
B Belanja Jasa Kantor													
1	Belanja Kawat/Faksi mili/Internet	25	65 Paket	20	55 Paket	80	84	17.400.000	47.850.000	11.522.341	35.037.770	66	73
2	Belanja Jasa THL	16	16 Oranng	16	16 Oranng	100	100	474.600.000	549.360.000	469.430.250	535.936.816	99	98
3	Belanja Surat Kabar	-	1000 Paket	-	1000 Paket	-	0	-	7.200.000	-	7.200.000	-	0
4	Belanja Jasa Tenagakerja Sopir	12	12 Oranng	12	12 Oranng	100	100	42.000.000	42.000.000	42.000.000	38.500.000	100	91
5	Belanja luran Asuransi Kesehatan	28	28 Oranng	28	28 Oranng	100	100	17.472.000	17.472.000	15.413.250	17.466.120	88	99

6	Belanja luran Asuransi Ketenagakerjaan	28 Oran g	28 Oran g	28 Ora ng	28 Ora ng	1 0 0	1 0 0	3.144. 960	3.150.000	2.774.385	3.143.931	8 8	9 9
C													
Belanja Persyaratan Bermotor													
1	Belanja Jasa Service	2 Ka li, 2 Ke nd a ra an	2 Kali, 2 Kenda raan	2 Kali, 2 Ken d araa n	2 Kali, 2 Ken d araa n	1 0 0	1 0 0	10.000. 000	32.000.00 0	9.995.115	28.314.30 6	9 9	9 7
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	2 Ke nd a ra an	2 Kenda raan	2 Ken d araa n	2 Ken d araa n	1 0 0	1 0 0	58.500. 000	47.000.00 0	58.450.000	46.695.73 8	9 9	9 9
3	Belanja bahan bakar minyak/gas	2 Ke nd a ra an	2 Kenda raan	2 Ken d araa n	2 Ken d araa n	1 0 0	1 0 0	30.000. 000	47.772.00 0	29.700.847	29.700.84 7	9 9	6 6
4	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2 Ke nd a ra an	2 Kenda raan	1 Ken d araa n	2 Ken d araa n	5 0 0	1 0 0	4.700.0 00	5.061.000	1.269.900	5.061.000	2 7	1 0 0
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2 Ke nd a ra an	2 Kenda raan	1 Ken d araa n	2 Ken d araa n	5 0 0	1 0 0	2.800.0 00	5.061.000	620.000	5.061.000	2 2	1 0 0
D													
Belanja Cetak dan Pengadaan													
1	Belanja Cetak Baliho dan Roll Baner	26 Kegi atan	24 Kegi atan	26 Kegi atan	24 Kegi atan	10	100	39.7 50.0 00	58.800. 000	39.748. 000	56.795.00 0	99	98

	Belanja													
	Pengadaa	721.3	278.8	721.	278.			263.						
2	n FC dan Surat Edaran	14 Kali	73 Kali	3 14 Kali	8 73 Kali	10	100	341. 161	225.43 3.000	263.32 5.200	225.409.0 00	99	99	
E	Belanja Sewa													
	Belanja													
	Sewa							79.6						
1	Gedung/K a ntor	1 kali	2 kali	1 kali	2 kali	10	100	00.0 00	120.00 0.000	79.600. 000	118.500.0 00	100	98	
F	Belanja Sewa Sarana Mobilitas													
	Belanja													
	Sewa							12.2						
1	Kendaraan Mitsubishi Pajero	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10	100	50.0 00	12.250. 000	12.200. 000	12.200.00 0	99	99	
G	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan Kantor													
	Belanja													
	Sewa							74.0						
1	Tenda	1 Kali	-	1 Kali	-	10	-	00.0 00	-	74.000. 000	-	100	-	
	Belanja													
	Sewa							48.0						
2	Sound System	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	10	100	00.0 00	35.000. 000	48.000. 000	34.500.00 0	100	99	
	Belanja													
	Sewa							39.9						
3	AlatAlat Studio	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	10	100	00.0 00	39.900. 000	39.900. 000	39.900.00 0	100	-	
H	Belanja Makanan dan Minuman													
	Belanja													
	Makanan dan	26 Kali	24 Kali	26 Kali	24 Kali	10	100	271. 736. 040	357.40 0.000	271.49 8.750	356.579.0 00	99		
xxx														
	Belanja Honorium													
	Satuan													
3	Pengelola Barang		21 Orang				21 Orang							
			7 Kegiatan				7 Kegiatan							
									100		31.800.000		31.800.000	
													100	

M				Belanja Honorium Pegawai honorer									
1	Honorium Narasumber Kegiatan	6 Orang 2 Kegiatan	-	6 Orang 2 Kegiatan	-	100	-	30.000.000	-	30.000.000	-	100	-

Sesuai hasil penelitian *Input* tiap kegiatan dapat dilihat dalam kolom realisasi keuangan Biro Organisasi Sekertariat Daerah yang dapat dilihat dalam table 4.2 tentang Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Organisasi Sekertariat Daerah Tahun 2021-2022. Oleh karena itu, maka dalam analisis *Value For Money* elemen ekonomi setiap kegiatan pada tahun 2021-2022 setelah dimasukkan kedalam formula pengukuran ekonomi maka hasilnya diperlihatkan pada table 4.3 berikut ini:

Tabel 4. Tabel Pengukuran Ekonomi Kegiatan Biro Organisasi Sekertariat Daerah

Program	Kegiatan	2021			2022		
		Nilai Input	Input	Tingkat Ekonomi (%)	Nilai Input	Input	Tingkat Ekonomi (%)
Belanja	Belanja Bolpoint	3.600.000	3.600.000	100	24.560.000	24.560.000	100
Barang dan	Belanja Post IT	8.997.000	8.997.000	100	5.424.000	5.424.000	100
Jasa	Belanja Binder Clips	121.800.000	121.739.700	99	128.536.000	128.500.180	99
	Belanja Map Folio	57.605.000	57.605.000	100	60.896.000	60.896.000	100
	Belanja Tinta Botol	76.750.000	76.743.400	99	52.760.000	52.760.000	100
	Kalkulator	-	-	-	2.000.000	2.000.000	100
	Belanja Kertas Foto	41.580.000	41.580.000	100	28.568.000	28.568.000	100
	Belanja Veburator	2.625.000	2.625.000	100	1.260.000	1.260.000	100
	Belanja Odner	9.625.000	9.625.000	100	42.423.000	42.423.000	100
	Belanja Kertas HVS	122.475.935	122.073.400	99	121.800.000	121.800.000	100
	Belanja Kawat/Faksimili/Inter net	17.400.000	11.522.341	66	47.850.000	35.037.770	73
Belanja	Belanja Jasa THL	476.600.000	469.430.250	99	549.360.000	535.936.816	98
Jasa	Belanja Surat Kabar	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100
Kantor	Belanja Jasa Tenagakerja Sopir	42.000.000	42.000.000	100	42.000.000	38.500.000	91
	Belanja luran Asuransi Kesehatan	17.472.000	15.413.250	88	17.472.000	17.466.120	99
	Belanja luran Asuransi Ketenagakerjaan	3.144.960	2.774.385	88	3.150.000	3.143.931	99
Belanja	Belanja Jasa Service	10.000.000	9.995.115	99	32.000.000	28.314.306	97
Persyaratan	Belanja Penggantian Suku Cadang	58.500.000	58.450.000	99	47.000.000	46.695.738	99
Kendaraan							

Bermotor	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000	29.700.847	99	47.772.000	29.700.847	66
	Belanja Pajak Kendaraan	4.700.000	1.269.900	27	5.061.000	5.061.000	100
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000	620.000	22	5.061.000	5.061.000	100
Belanja Cetak dan Pengadaan	Belanja Cetak Baliho dan Roll Baner	39.750.000	39.748.000	99	58.800.000	56.795.000	98
	Belanja Pengadaan FC dan Surat Edaran	263.341.161	263.325.200	99	225.433.000	225.409.000	99
Belanja Sewa	Belanja Sewa Gedung/Kantor	79.600.000	79.600.000	100	120.000.000	118.500.000	98
Belanja Saran Mobilitas	Belanja Sewa Kendaraan Mitsubishi Pajero	12.250.000	12.200.000	99	12.250.000	12.200.000	99
Belanja Sewa Perlengkapan dan	Belanja Sewa Tenda	74.000.000	74.000.000	100	-	-	-
Peralatan Kantor	Belanja Sewa Sound System	48.000.000	48.000.000	100	35.000.000	34.500.000	99
	Belanja Sewa Alat-Alat Studio	39.900.000	39.900.000	100	39.900.000	39.900.000	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	271.736.040	271.498.750	99	357.400.000	356.579.000	99
Belanja Makanan dan Minuman	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000	6.000.000	100	28.800.000	27.780.000	99
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000	7.170.000	84	3.000.000	0	0
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.750.000	39.750.000	100	60.000.000	57.354.000	97
Belanja Pakaian	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	41.000.000	40.909.000	99
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	228.010.000	226.675.000	98	395.850.000	393.879.000	98
Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	479.692.979	476.025.522	99	408.400.000	407.425.657	99
	Service Komputer	12.850.000	12.844.728	99	10.000.000	10.000.000	100
Belanja Pemeliharaan Peralatan	Service AC	9.000.000	9.000.000	100	1.600.000	1.600.000	100
	Belanja Honorium Tenaga Ahli	116.700.000	116.650.000	99	161.200.000	161.050.000	99
Belanja Honorium	Belanja Honorium Satuan Pengelolah	45.240.000	44.890.000	99	-	-	-

PNS	Keuangan						
	Belanja Honorium						
	Satuan Pengelolah	31.800.000	31.800.000	100	-	-	-
	Barang						
	Honorium						
	Narasumber	30.000.000	31.800.000	100	-	-	-
	Kegiatan						
Belanja Honorium Pegawai Honorer							
JUMLAH							

SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dari aspek ekonomi disimpulkan bahwa kinerja dinilai cukup ekonomis dengan rasio hampir 100% pada tahun 2021 mencapai 93,76% dan pada tahun 2022 sebesar 94,89%. Hal ini mengindikasikan efisiensi penggunaan anggaran yang baik dan dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan.
2. Berdasarkan hasil analisis dari aspek efisiensi disimpulkan bahwa kinerja dinilai efisien dengan rasio tahun 2021 mencapai 107,76% dan pada tahun 2022 mencapai 100,02% dengan mayoritas kegiatan dikatakan efisien. Meskipun terdapat satu kegiatan, yaitu Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada tahun 2022, yang dianggap tidak efisien karena tidak ada realisasi, namun anggaran tetap diberikan sebesar 3.000.000.
3. Berdasarkan hasil analisis dari aspek efektivitas, rasio efektivitas pada tahun 2021 menunjukkan rata-rata mencapai 105,92%, namun hanya terdapat 3 kegiatan yang dapat dianggap efektif, yaitu Belanja Kawat/Faksimili/Internet, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor, dan Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2022, meskipun terdapat 97,81% efektivitas secara keseluruhan, namun terdapat satu program kegiatan, yaitu Belanja Makan dan Minum Kegiatan, yang tidak dapat dianggap efektif karena anggaran tidak terealisasi. Oleh karena itu, evaluasi kinerja program kegiatan Biro Organisasi Sekertariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan penggunaan anggaran yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Indeks. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi 1.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UI Press : Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Sadeli, Lili M. 2015. Accounting Theory. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.